

ANALISIS DETERMINAN BELANJA MODAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PAD SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2019

Syifa Hanida
syifahanida99@gmail.com

Wawan Ichwanudin
ichwan0308@untirta.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the influence of PDRB, DAU, DAK, DBH on Capital Expenditure and The Implication For Regional Financial Performance Through PAD as Intervening Variable. The population in this study is all the district/city of Banten Province which consists of 8 distric/city for 10 years from 2010 – 2019. Furthermore, the instrument used sensus. Additionally, the data were secondary which taken from Budget Realization Report Of Local Budget (BPS website and www.djpk.depkeu.go.id). The data analysis technique used stepwise regression with backward approach for antacedent regression model and intervening regression for intervening regression model.

Based on the results of this study concluded that (1) PDRB has positive and significant effect on Capital Expenditure, (2) DAU has positive and significant effect on Capital Expenditure, (3) DAK has positive and significant effect on Capital Expenditure, (4) DBH has positive and significant effect on Capital Expenditure, (5) Capital Expenditure has positive and significant effect on PAD, (6) PAD has negative and no significant effect on Regional Financial Performance, (7) Capital Expenditure has positive and significant effect on Regional Financial Performance, (8) PAD doesn't succeed in mediating the effect of Capital Expenditure on Regional Financial Performance.

Keyword : PDRB, DAU, DAK, DBH, Capital Expenditure, Regional Financial Performance, PAD

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 berdampak pada hubungan keuangan antara pusat dan daerah, yang mana sebagian besar fungsi pemerintahan mengenai pelayanan dasar diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, termasuk pengelolaan anggaran yang digunakan untuk belanja atas pelayanan-pelayanan dasar wajib tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kekuasaan yang luas kepada daerah otonom yaitu ditekankan pada kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja daerah yang dibutuhkan berdasarkan asas kepatuhan, kebutuhan

dan kemampuan daerah. Selanjutnya pengalokasian sumber daya tersebut dapat direalisasikan dengan mewujudkan pembangunan daerah. Pembangunan secara fisik dapat dilaksanakan apabila perencanaannya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah khususnya pada pos belanja modal. Maka dari itu, pembangunan yang dapat dilaksanakan secara baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah suatu daerah yang dapat dilihat berdasarkan rasio keuangan daerah salah satunya adalah rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Rasio pertumbuhan merupakan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang diperolehnya dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya (Lathifa dan Haryanto, 2019).

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan maka diketahui besarnya rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2010 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini

Tabel 1.1
Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Banten
Periode tahun 2010-2019

Tahun	Rata-Rata Pertumbuhan Total Pendapatan (Dalam %)
2010	66.08
2011	37.57
2012	14.73
2013	16.52
2014	39.78
2015	6.05
2016	7.55
2017	9.75
2018	1.34
2019	7.52

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat adanya fenomena bisnis yang merupakan fenomena masalah yaitu rasio pertumbuhan pendapatan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Banten periode 2010-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pertumbuhan pendapatan daerah dimulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami

pertumbuhan yang cukup baik, namun demikian dari tahun 2016 sampai dengan 2019 pertumbuhannya mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kinerja keuangan daerah perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan dan peningkatan kinerja keuangan daerah. Beberapa penelitian sebelumnya sering mengaitkan kinerja keuangan daerah dengan variabel belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, Adiputra dan Sulindawati (2015) serta Asnidar dan Hardi (2019) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, Nugroho dan Rohman (2012) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian di atas, maka peneliti mengindikasikan adanya *research gap* antara belanja modal dengan kinerja keuangan daerah. Berdasarkan *research gap* tersebut, maka dilakukan pengembangan model penelitian dengan menambahkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengatasi *gap* tersebut.

Selain itu, belanja modal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu DAU, DAK dan DBH. Hal ini sesuai dengan *agency theory*, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus sistem pemerintahannya sendiri yang dibantu dengan adanya transfer dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH yang dapat digunakan untuk pengalokasian belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosalin dan Riharjo (2017) menyatakan bahwa hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,398 atau 39,8%. Hal tersebut menunjukkan kontribusi dari model penelitian yang digunakan yaitu DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal sebesar 39,8% dan sisanya 60,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Maka dilihat dari hasil koefisien determinasi (R^2) tersebut masih di bawah 0,5 atau 50% yang artinya masih rendah. Berdasarkan penelitian di atas, maka mengindikasikan adanya *research gap* dalam penelitian tersebut. Berdasarkan *research gap* tersebut, maka dilakukan pengembangan

model penelitian dengan menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi *gap* tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) apakah pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2019? (2) apakah dana alokasi umum mempunyai pengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2019? (3) apakah dana alokasi khusus mempunyai pengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2019? (4) apakah dana bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2019? (5) apakah belanja modal mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2019? (6) apakah pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2019? (7) apakah belanja modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2019? (8) apakah belanja modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2019?

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

LANDASAN TEORI

Agency Theory

Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Agensi yang diinterpretasikan dalam aplikasi organisasi sektor publik. *Agency theory* dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik (Waskito, Zuhrotun dan Ruserlisyani, 2019). Pada sector privat, Teori agensi merupakan sebuah teori yang menyatakan adanya sebuah persetujuan atau kontrak antara dua pihak yaitu pihak prinsipal dan pihak agen. Dimana pihak prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada pihak agen untuk mengambil sebuah keputusan atas nama prinsipal (Jansen dan Meckling, 1976). Pada organisasi sektor publik. Hubungan teori agen dengan

variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat proses transfer dana perimbangan berupa DAU, DAK, dan DBH dari pemerintah pusat sebagai pihak prinsipal kepada pemerintah daerah sebagai pihak agen. Selanjutnya dana perimbangan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan suatu daerah serta melengkapi fasilitas publik melalui alokasi belanja modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak pada meningkatnya pendapatan yang diperoleh suatu daerah. Peningkatan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Indikator keberhasilan suatu daerah dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak agen mampu dalam mengelola seluruh sumber dana yang diperoleh oleh daerah tersebut karena tugas dari pihak agen sendiri yaitu untuk menjalankan wewenang yang sudah diberikan oleh pihak prinsipal. Namun dalam proses penyusunan anggaran tersebut tentunya terdapat masalah keagenan yang terjadi, di mana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kepentingannya masing-masing. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan informasi yang dimiliki oleh pihak bersangkutan sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (*asymmetric information*) (Adyatma dan Oktaviani, 2015).

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Wertianti dan Dwirandra, 2013). PDRB ini menggambarkan keahlian suatu wilayah dalam menghasilkan output ataupun nilai tambah selama waktu tertentu (BPS, 2018: 181).

Dana Alokasi Umum

DAU yang tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang ditransfer kepada daerah guna melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai

kebutuhan masing-masing daerah dalam kegiatan pelaksanaan desentralisasi. DAU ini bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah sehingga mampu mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan potensi daerah.

Dana Alokasi Khusus

DAK yang tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang ditransfer kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga sesuai dengan prioritas nasional. DAK sendiri memiliki beberapa kebijakan diantaranya yaitu usulan daerah sesuai prioritas nasional, *money follow program*, menciptakan lapangan kerja, dsb. Saat ini DAK reguler berjumlah 10 bidang diantaranya yaitu bidang pendidikan; kesehatan dan keluarga berencana; infrastruktur perumahan, pemukiman, air minum dan sanitasi; kedaulatan pangan; energi skala kecil; kelautan dan perikanan; kehutanan dan lingkungan hidup; transportasi; sarana perdagangan dan industri kecil dan menengah, pariwisata; serta prasarana pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil

DBH yang tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang ditransfer kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan desentralisasi. DBH dapat berasal dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam.

Belanja Modal

Belanja modal dapat diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun) (Erlina dkk. 2016: 155). Belanja modal ini terdiri dari belanja modal tanah, belanja

modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan perolehan pendapatan suatu daerah yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD ini dapat bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba dari perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan suatu tingkat pencapaian hasil program yang dikerjakan pada bidang keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan dan belanja daerah dengan memakai indikator keuangan dan ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran berjalan (Mulyani dan Wibowo, 2017). Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini kinerja keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dapat diharapkan mampu menumbuhkan potensi masing-masing yang ada di daerah tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi hal ini akan berdampak pula terhadap penambahan jumlah investasi

modal swasta maupun pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ayem dan Pratama (2018), Nugraha dan Dwirandra (2016), Jaeni dan Anggana (2016), Setiawan dan Saputra (2018), Nurlis (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis 1 Pertumbuhan ekonomi Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Besarnya transfer DAU dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam waktu jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan transfer DAU akan berdampak pada penurunan pengeluaran belanja modal. Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang diterima oleh suatu daerah menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Maka dari itu besar kecilnya tingkat pengeluaran untuk belanja modal sangat dipengaruhi oleh besarnya DAU yang diterima oleh suatu daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nurzen dan Riharjo (2016), Priambudi (2017), Sudika dan Budiarta (2017), Wertianti dan Dwirandra (2013), Suprayitno (2015), Kumendong dan Hutabarat (2020), Nuarisa (2013), Permatasari dan Mildawati (2016), Heliyanto dan Handayani (2016), Adyatma dan Oktaviani (2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis 2 Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer dari pemerintah pusat bertujuan untuk mendanai kebutuhan fisik sehingga dapat meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan amanat peraturan menteri keuangan. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan alokasi belanja pembangunan

infrastruktur lebih tinggi dengan bantuan pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan pengalokasian belanja untuk kebutuhan fisik yang dalam APBD tercatat dalam jenis barang modal (Retno dan Widiatmoko, 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pelealu (2013), Sudika dan Budiarta (2017), Kumendong dan Hutabarat (2020), Retno dan Widiatmoko (2019), Nuarisa (2013), Mulyati (2019), Permatasari dan Mildawati (2016), Novianto dan Hanafiah (2015), Wandira (2013) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) dapat meningkatkan alokasi belanja daerah terutama tingkat alokasi belanja modal guna meningkatkan fasilitas publik bagi daerah sebagai tujuan desentralisasi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati (2016), Heliyanto dan Handayani (2016), Novianto dan Hanafiah (2015), Wandira (2013), Bakhrudin dkk. (2020), Handayani dkk. (2015), Sholikhah dan Wahyudin (2014) menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis 4 Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Belanja Modal Terhadap PAD

Belanja daerah terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung ini termasuk di dalamnya belanja modal. Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 menyatakan bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan pengalokasian belanja modal ini guna pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana bagi pelayanan publik dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara efisien dan efektif. Kemudian belanja modal ini dapat dialokasikan dalam bentuk belanja aset. Pengelolaan belanja modal yang optimal diantaranya digunakan untuk meningkatkan sarana

dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi daerah sehingga pertumbuhan ekonomi pun akan tinggi dan masyarakat pun dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dan mereka merasa puas terhadap fasilitas yang memadai tersebut, maka hal ini membuat masyarakat akan rela untuk membayar retribusi dan pajak kepada pemerintah daerah karena telah menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya dan tentu saja hal ini nantinya dapat mendorong peningkatan PAD di daerah tersebut dari hasil retribusi dan pajak tersebut (Ririn dkk., 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012), Darwanis dan Saputra (2014), Dwigantara dan Handayani 46 (2020) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis 5 Belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD

Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah dapat memperkecil tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat (Antari dan Sedana, 2018). Hal ini juga sejalan dengan Nugroho dan Rohman (2012) yang mengemukakan bahwa daerah yang memiliki PAD tinggi dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal ini akan berimplikasi baik terhadap kinerja keuangan daerahnya. 47 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Saraswati dan Rioni (2019), Antari dan Sedana (2018), Junarwati dkk. (2013), Ayu (2018) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis 6: PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Belanja modal digunakan untuk membiayai pembangunan suatu daerah yaitu dengan memperbaiki dan melengkapi fasilitas publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

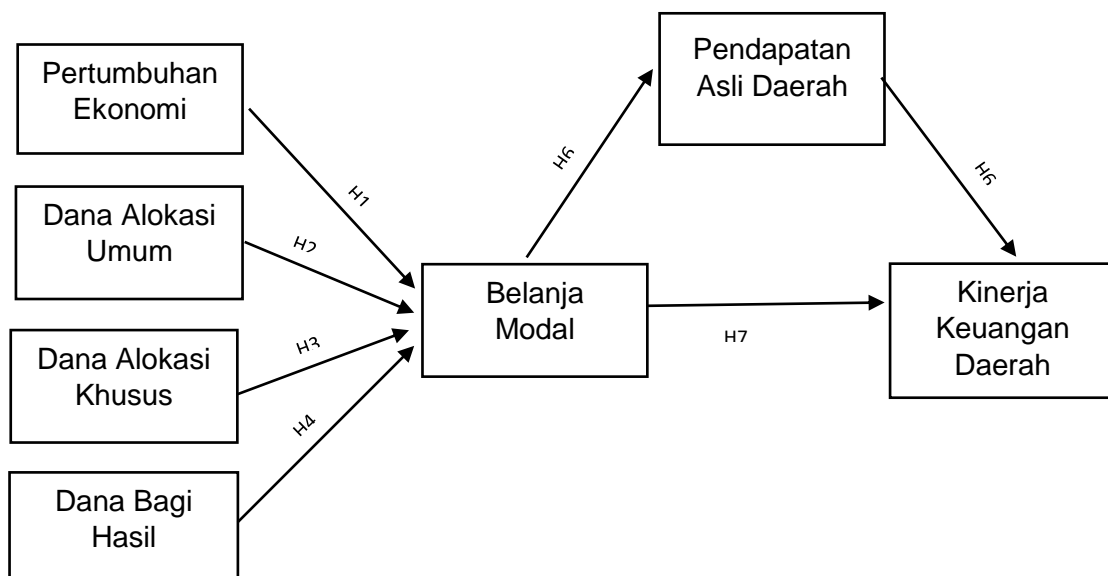
masyarakat dan juga produktivitas masyarakat. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah, maka hal ini menunjukkan semakin baik pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah. Pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah yang baik berdampak pada value for money yang baik dan juga penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi baik pula. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puspitasari, Adiputra dan Sulindawati (2015), Lathifa dan Haryanto (2019), Yuliansyah dkk. (2020), Normalita dan Mahmud (2017) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis 7 Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening

Adanya pembangunan infrastruktur yang memadai akan dapat pula meningkatkan PAD suatu daerah. Tingkat penerimaan daerah yang tinggi menunjukkan semakin tinggi pula belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing sehingga akan berdampak baik pada tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah (Puspitasari, Adiputra dan Sulindawati, 2015). Pemerintah perlu memberikan fasilitas yang baik untuk menunjang berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi (Nugroho dan Rohman, 2012). Dengan adanya pembangunan berbagai fasilitas tersebut maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak pada meningkatnya pendapatan yang diperoleh suatu daerah. Peningkatan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Indikator keberhasilan suatu daerah dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012), Amrozi (2016), Puspitasari, Adiputra dan Sulindawati (2015) menyatakan

bahwa belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui PAD sebagai variabel intervening memiliki pengaruh positif. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis 8 Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah melalui PAD sebagai variabel intervening

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah desain penelitian kausalitas. Penelitian ini diarahkan untuk menemukan sebab akibat dari satu atau dua masalah dengan tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu (Andirfa, Basri dan Majid, 2016). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa data APBD yang bersumber dari

BPS Provinsi Banten dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui website www.djpk.depkeu.go.id

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumen, mempelajari dokumen tersebut, lalu melakukan proses pencatatan dan melakukan perhitungan terhadap data yang bersifat relevan dengan permasalahan di dalam penelitian ini (Priambudi, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan model penelitian maka terdapat dua model regresi yaitu regresi antaseden dengan menggunakan regresi *stepwise* dengan pendekatan *backward* untuk menyelesaikan hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 4, kemudian regresi intervening untuk menyelesaikan hipotesis 5 sampai dengan hipotesis 8.

Hasil uji *stepwise* sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa hasil regresi *stepwise* dengan menggunakan pendekatan *backward* menyatakan bahwa seluruh variabel adalah predictor yang signifikan.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15,058	4,549		-3,310	,002
	PDRB	,123	,073	,138	1,687	,097
	DAU	,594	,235	,243	2,525	,014
	DAK	,288	,058	,421	4,980	,000
	DBH	,906	,082	,774	11,099	,000

a. Dependent Variable: BM

Regresi Intervening dilakukan dengan melakukan penhujian regresi secara bertahap yaitu menguji pengaruh belanja modal terhadap PAD, berikutnya melakukan pengujian regresi berganda dimana kinerja keuangan sebagai variabel dependen dengan variabel

independent belanja modal dan PAD. Hasil pengujian regresi tersebut ditampilkan pada tabel 2 dan tabel 3.

Tabel 2						
Pengaruh Belanja Modal Terhadap PAD						
Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-10,082	1,556		-6,481	,000
	BM	1,503	,078	,926	19,241	,000

a. Dependent Variable: PAD

Tabel 3						
Pengaruh Belanja Modal dan PAD Terhadap Kinerja Keuangan Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-22,361	32,778		-,682	,498
	BM	6,385	3,355	,616	1,903	,062
	PAD	-4,736	2,066	-,742	-2,292	,025

a. Dependent Variable: KKD

Berdasarkan pengujian regresi stepwise dan regresi interveing diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut : sebagai berikut :

Pengaruh PDRB Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji regresi *stepwise* pada tabel 1 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,687 > 1,29582$) dengan nilai signifikan $< 0,10$ ($0,097 < 0,10$) yang artinya signifikan, hal ini menunjukkan peningkatan yang terjadi pada PDRB di suatu daerah dapat mendorong pula proses pengoptimalan sumber pendapatan daerah melalui potensi yang dimiliki masing-masing daerah sehingga dapat meningkatkan jumlah investasi modal swasta maupun pemerintah. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga artinya bahwa penganggaran belanja modal pun akan ikut meningkat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana bagi publik

sebagai penunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Pratama (2018), Nugraha dan Dwirandra (2016), Jaeni dan Anggana (2016), Setiawan dan Saputra (2018), Nurlis (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji regresi *stepwise* pada pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,525 > 1,67065$) dengan nilai signifikan $< 0,05$ ($0,014 < 0,05$) yang artinya signifikan, hal ini menunjukkan peningkatan DAU berdampak baik terhadap alokasi belanja modal. DAU merupakan transfer dana dari pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. DAU yang diterima oleh pemerintah daerah ini mampu meningkatkan alokasi belanja modal yang digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun terjamin. Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang diterima oleh suatu daerah menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Maka dari itu besar kecilnya tingkat pengeluaran untuk belanja modal sangat dipengaruhi oleh besarnya DAU yang diterima oleh suatu daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurzen dan Riharjo (2016), Priambudi (2017), Sudika dan Budiarta (2017), Wertianti dan Dwirandra (2013), Suprayitno (2015), Kumendong dan Hutabarat (2020), Nuarisa (2013), Permatasari dan Mildawati (2016), Heliyanto dan Handayani (2016), Adyatma dan Oktaviani (2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji regresi *stepwise* pada pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,980 > 1,67065$) dengan nilai signifikan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) yang artinya signifikan, hal ini menunjukkan peningkatan transfer DAK dari pemerintah pusat kepada daerah tentunya dapat meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional yang mempunyai umur ekonomis panjang

diantaranya yaitu kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana publik pada 10 bidang diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan, kehutanan, dan lain-lain. Dengan adanya pembangunan yang sesuai dengan prioritas nasional tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan publik sehingga kesejahteraan seluruh masyarakat dapat terjamin. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pelealu (2013), Sudika dan Budiarta (2017), Kumendong dan Hutabarat (2020), Retno dan Widiatmoko (2019), Nuarisa (2013), Mulyati (2019), Permatasari dan Mildawati (2016), Novianto dan Hanafiah (2015), Wandira (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji regresi *stepwise* pada pada tabel 1 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($11,099 > 1,67065$) dengan nilai signifikan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) yang artinya signifikan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan DBH maka alokasi belanja pun akan meningkat. DBH ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui perbaikan dan peningkatan fasilitas publik sebagai tujuan desentralisasi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Selanjutnya pola bagi hasil penerimaan diterapkan berdasarkan proporsi tertentu yang berdasarkan atas daerah penghasil. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati (2016), Heliyanto dan Handayani (2016), Novianto dan Hanafiah (2015), Wandira (2013), Bakhrudin dkk. (2020), Handayani dkk. (2015), Sholikhah dan Wahyudin (2014) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap PAD

Berdasarkan hasil uji regresi *intervening* pada tabel 2 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($19,241 > 1,66940$) dengan nilai signifikan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) yang artinya signifikan, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal akan memberikan dampak yang baik

terhadap peningkatan PAD di suatu daerah. Belanja modal yang digunakan untuk belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur mampu menunjang kegiatan ekonomi masyarakat sehingga hal ini membuat masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab untuk membayar retribusi dan pajak daerah karena telah menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah yang tentunya akan meningkatkan perolehan PAD sebagai sumber penerimaan potensial bagi daerah tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola alokasi belanja modal dengan baik karena mampu meningkatkan PAD di daerah tersebut (Ririn dkk., 2014). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012), Darwanis dan Saputra (2014), Dwigantara dan Handayani (2020) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD.

Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 3 menunjukkan bahwa $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-2,292 < -1,66940$) dengan nilai signifikan $< 0,05$ ($0,025 < 0,05$) yang artinya tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah belum dapat memberikan dampak yang baik terhadap kinerja keuangan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perolehan kekayaan daerah berupa PAD ini belum optimal sehingga tidak serta merta mampu mendorong peningkatan terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Rata-rata kontribusi PAD Provinsi Banten terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah Provinsi Banten hanya sebesar 19,76%, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas desentralisasi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dinilai masih kurang sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah belum mampu dalam menggali potensi daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan data realisasi APBD Provinsi Banten tahun 2010 – 2019 menunjukkan bahwa perolehan PAD yang bersumber dari hasil pajak daerah lebih tinggi daripada hasil

retribusi daerah, maka dari itu ketergantungan pemerintah daerah terhadap hasil pajak daerah saja dinilai belum cukup untuk mendanai seluruh kegiatan pemerintah daerah, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih terus bergantung pada sumber pendanaan yang bukan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah diantaranya dana yang bersumber dari APBN yaitu dana perimbangan diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu juga pengelolaan yang kurang baik terhadap sumber pendapatan daerah akan menyebabkan penurunan pada kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) dan Wiguna (2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 3 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,903 > 1,29513$) dengan nilai signifikan $< 0,10$ ($0,062 < 0,10$) yang artinya signifikan, hal ini menunjukkan peningkatan pada belanja modal belum dapat memberikan dampak yang baik pula terhadap pengelolaan kinerja keuangan daerah. Belanja modal ini umumnya dialokasikan untuk memperoleh aset tetap guna melaksanakan pembangunan di suatu daerah. Infrastruktur yang memadai di suatu daerah dapat merangsang produktivitas masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan terjamin. Selain itu, dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor yang nantinya akan berdampak baik terhadap penilaian kinerja keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, Lathifa dan Haryanto (2019), Yuliansyah dkk. (2020), Normalita dan Mahmud (2017) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening

Hasil pengujian regresi intervening pada tabel 3 secara eksplisit menggambarkan hubungan kausalitas antara variabel yang ditunjukkan oleh anak panah tersebut. Setiap nilai p menjelaskan jalur dan koefisien jalur. Besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dapat dilihat dari persamaan berikut ini:

- a. Pengaruh Langsung = 0,616
- b. Pengaruh Tidak Langsung = $0,926 \times (-0,742) = -0,687$
- c. Total Pengaruh = $0,616 + (-0,687) = -0,071$

Maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung yaitu $0,616 > -0,687$ serta besarnya total pengaruh yaitu $-0,071$. artinya bahwa PAD tidak berhasil memediasi hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak berdampak baik terhadap belanja modalnya sehingga kinerja keuangan daerah pun tidak meningkat. PAD merupakan keseluruhan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Tingkat penerimaan daerah yang tinggi menunjukkan semakin tinggi pula belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing sehingga akan berdampak baik pada tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah (Puspitasari, Adiputra dan Sulindawati, 2015).

Pemerintah dapat memberikan fasilitas yang baik untuk menunjang berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi (Nugroho dan Rohman, 2012). Namun, pemerintah daerah belum dapat melakukan pembangunan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten sehingga PAD yang diterima oleh daerah tidak dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap kinerja keuangan daerah yang nantinya akan dilaporkan, maka hal ini tentunya berdampak pula terhadap kemajuan daerah yang kurang maksimal karena keberhasilan daerah salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan daerah tersebut. Rata-rata kontribusi PAD Provinsi Banten terhadap peningkatan

kinerja keuangan daerah Provinsi Banten hanya sebesar 19,76%, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas desentralisasi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dinilai masih kurang sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah belum mampu dalam menggali potensi daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih terus bergantung pada sumber pendanaan yang bukan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah diantaranya dana yang bersumber dari APBN yaitu dana perimbangan diantaranya DAU, DAK, dan DBH. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardiani (2017) menyatakan bahwa PAD tidak berhasil memediasi hubungan antara belanja modal dengan kinerja keuangan daerah. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012), Amrozi (2016), Puspitasari, Adiputra dan Sulindawati (2015) menyatakan bahwa PAD berhasil memediasi hubungan antara belanja modal dengan kinerja keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai pengaruh PDRB, DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Modal dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode 2010 – 2019, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal
4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal
5. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD

6. PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah
7. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah
8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berhasil memediasi hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah

SARAN

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Banten masih memiliki tingkat kemandirian daerah yang cukup rendah karena tingkat penerimaan PAD yang masih rendah sehingga masih perlu dibantu dengan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat, hal ini pun berdampak pada rendahnya kinerja keuangan daerah. Maka dari itu pemerintah daerah Provinsi Banten diharapkan mampu untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah yang diantaranya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
- b. Berdasarkan hasil penelitian di atas meskipun belanja modal mempunyai pengaruh signifikan tetapi dilihat berdasarkan proporsinya belanja modal ini lebih rendah daripada proporsi belanja operasional termasuk di dalamnya belanja pegawai, belanja bunga, dsb. Maka dari itu strategi yang diharapkan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja modal yaitu dengan cara meminimalisir terjadinya pemborosan anggaran pada belanja pegawai agar tidak ada lagi kegiatan yang tidak menunjang terhadap keberhasilan suatu program di daerah tersebut, pemerintah daerah bersama dengan kementerian keuangan harus mampu menetapkan angka minimal untuk alokasi belanja modal dari APBD ketika sudah berhasil angka minimal tersebut maka pemerintah daerah diperbolehkan untuk meningkatkan belanja pegawai dan belanja operasional lainnya, memperketat dan mengawasi lebih lanjut

terhadap penggunaan dana hibah dan bantuan sosial agar tidak melebihi sasaran yang sudah ditetapkan sehingga hal ini dapat meningkatkan belanja modal untuk melaksanakan pembangunan daerah dan memperbaiki fasilitas publik lainnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan rasio pengukuran kinerja keuangan daerah yang lainnya agar mampu menggambarkan kondisi ekonomi Provinsi Banten lebih relevan dan lengkap.
- b. Disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian dengan periode pengamatan yang terbaru dan rentang waktu lebih panjang sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih rinci.
- c. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel intervening lainnya yang dianggap mampu memediasi hubungan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Ni Putu Gina Sukma. Sedana, Ida Bagus Panji. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*. 7(2): 1095. ISSN: 2302-8912.
- Adyatma, Erdi. Oktaviani, Rachmawati Meita. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. 4(2): 193, 203. ISSN :1979-4878.
- Amrozi, Akhmad Imam. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*. 1(1): 2. ISSN 2502 – 3764.
- Andirfa, Mulia. Basri, Hasan. Majid, M Shabri A. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. 5(3): 33. ISSN 2302-0164.
- Asnidar. Hardi, Novia Sintia. 2019. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*. 3(1): 17.
- Ayu, Putri Puspita. 2018. Analisis PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Fe. UIN PGRI Kediri*. 3(1): 93. ISSN: 2541-0180.

- Ayem, Sri. Pratama, Dessy Dyah. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara*. 2(2): 179. p-ISSN: 2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637.
- Bakhrudin. Setiawan, M. Arief. Sutrisno. 2020. Pengaruh PAD, DAU dan DBH Terhadap Belanja Modal: Studi Kasus Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur. *Seminar Nasioanal gabungan Bidang Sosial – Polinema*. h:39.
- Darwanis. Saputra, Ryanda. 2014. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*. 1(2): 196.
- Dwigantara, Moch. Putra. Handayani, Nur. 2020. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. 9(10): 18. e-ISSN: 2460-0585.
- Handayani, Sri Putri. Abdullah, Syukriy. Fahlevi, Heru. 2015. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. 4(2): 49. ISSN 2302-0164.
- Heliyanto, Firnandi. Handayani, Nur. 2016. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5(3): 16. ISSN 2460-0585.
- Jaeni. L, Greg Anggana. 2016. Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Bantuan Propinsi Terhadap Belanja Modal. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. 5(1): 18. ISSN :1979-4878.
- Junarwati. Basri, Hasan. Abdullah, Syukriy. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. 6(2): 192.
- Kumendong, Febricia Frontalin. Hutabarat, Francis M. 2020. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal : Analisa Keuangan Pada Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Accounting and Taxation*. 5(1): 55. e-ISSN: 2548-9925.
- Lathifa, Hasna. Haryanto. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*. 8(2): 7. ISSN (Online): 2337-3806.
- Mulyani, Sri. Wibowo, Hardiyanto. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmentalrevenue* Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan: Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015. *KOMPARTEMEN*. 15(1): 60.
- Mulyati, Sri. 2019. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Batam Tahun 2013-2017. *Measurement*. 13(1): 16. P-ISSN 2252-5394.
- Normalita, Ina Sarah. Mahmud, Amir. 2017. *Analysis Of Capital Expenditure And Its Implication On Local Financial Independence*. *Accounting Analysis Journal*. 6(2): 227. ISSN 2252-6765.

- Novianto, Riko. Hanafiah, Rafiudin. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*. 4(1): 8. ISSN: 2302-7169.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 2(1): 94. ISSN 2252-6765.
- Nugraha, I Putu Bagus Indra Mulia. Dwirandra, A.A.N.B. 2016. Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU Dan DBH Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 14(1): 307. ISSN: 2303-1018.
- Nugroho, Fajar. Rohman, Abdul. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*. 1(2): 3, 11.
- Nurlis. 2016. *The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case: The Local Government of Indonesia*. *Research Journal of Finance and Accounting*. 7(1): 112. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online).
- Nurzen, Miardi. Riharjo, Ikhsan Budi. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5(4): 15. ISSN : 2460-0585.
- Pelealu, Andreas Marzel. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA*. 1(4): 1196. ISSN 2303-1174.
- Permatasari, Isti. Mildawati, Titik. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5(1): 5, 15. ISSN : 2460-0585.
- Priambudi, Wimpi. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal*. 1(1): 145.
- Puspitasari, Ni Luh Putu Lindri. Adiputra, Made Pradana. Sulindawati, Ni Luh Gede Erni. 2015. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 3(1): 1-2.
- Retno, Nadiah Dwi. Widiatmoko, Jacobus. 2019. PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi: Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. 8(1): 31. ISSN: 2656 4955 (media online): 2656-8500 (media cetak).
- Ririn, Theodora. Prihatni, Rida. Yunika, Murdayanti. 2014. Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. 9(1): 39.
- Rosalin, Margareta Philipa. Riharjo, Ikhsan Budi. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. 6(9): 11. e-ISSN: 2460-0585
- Saraswati, Dwi. Rioni, Yunita Sari. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*. 9(2): 119. ISSN 2087- 4669

- Setiawan, Hendra. Saputra, Tunggal Ika. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Perimbangan Keuangan Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Daerah (Pemerintah Kabupaten Bogor). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. 6(1): 040. ISSN 2337 – 7852.
- Sholikhah, Imroatus. Wahyudin, Agus. 2014. Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal*. 3(4): 561. ISSN 2252-6765.
- Sudika, I Komang. Budiarta, I Ketut. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 21(2): 1714. ISSN: 2302-8556.
- Suprayitno, Bambang. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. 2(1): 112. ISSN 2339 – 1545.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, DAN DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 2(1): 45. ISSN 2252-6765.
- Waskito. Zuhrotun. Rusherlisyani. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal: Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*. 3(2): 223-224.
- Wertianti, I G A Gede. Dwirandra, A.A.N.B. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD dan DAU Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 4(3): 572. ISSN: 2302-8556.
- Wiguna, Kusnadi Yudha. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Fordema*. 12: 44.
- Yuliansyah, Rahmat. Susanti, Eva Indah. Yanti, Asri. 2020. *The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Jawa Province in 2013-2017. Advances in Economics, Business and Management Research*. 127: 156.